

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Siti Amalia Putri¹, Djayeng Turano Gunade², Jumadi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: sitiamaliaputri.0@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan dari suatu organisasi dapat dinilai dari keberhasilan kinerja pegawainya, namun pada desa Paliat Kinerja BPD masih mengalami beberapa hal sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui tentang kinerja BPD di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dan faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan baik hal ini dilihat dari : Variabel Efisiensi Ketersediaan SDM baik, BPD yang ada di desa Paliat terdiri dari 5 orang. Terkait sarana prasarana baik dilihat dari ketersediaan peralatan seperti laptop, wifi, printer, tempat kerja hingga hingga kendaraan operasional yakni satu buah sepeda motor untuk memudahkan anggota BPD dalam menjalankan tugasnya dan membuat laporan. Variabel Efektivitas tugas BPD dilaksanakan dengan baik, terkait fungsi BPD baik, (BPD) di Desa Paliat menjalankan fungsinya sesuai dengan ruang lingkupnya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Variabel Keadilan terkait penyaluran aspirasi belum baik dilihat dari kurang tersalurkan aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, , terkait adil belum baik karena masih ada masyarakat yang merasa bahwa pembangunan belum merata dan beberapa usulan belum terealisasi karena kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Variabel Daya Tanggap Terkait tanggung jawab baik, dilihat adanya laporan kinerja BPD, terkait transparansi belum baik karena karena masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan dan terealisasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat. Faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung kinerja adalah adanya dukungan sarana prasarana dalam menunjang kinerja BPD, dan faktor penghambat kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam musyawara desa.

Kata Kunci : Kinerja, BPD, Desa

ABSTRACT

The success of an organization can be assessed from the success of its employees' performance, but in Paliat Village, BPD Performance still experiences several things so this study aims to find out about BPD performance in Paliat Village, Kelua District, Tabalong Regency and the factors that influence it. The results of the study showed that this was seen from: Efficiency Variable Availability of good human resources, BPD in Paliat Village consists of 5 people. Regarding infrastructure, it is seen from the availability of equipment such as laptops, wifi, printers, workplaces to operational vehicles, namely one motorbike to facilitate BPD members in carrying out their duties and making reports. The Effectiveness Variable of BPD tasks is carried out well, related to the function of BPD well, (BPD) in Paliat Village carries out its functions according to its scope based on regional representation and is determined democratically. The Justice variable related to the channeling of aspirations is not good, seen from the lack of channeling of community aspirations through the Village Consultative Body so that village government cannot run accountably and transparently, related to fairness is not good because there are still people who feel that development is not evenly distributed and several proposals have not been realized due to the lack of transparency and community participation. Responsiveness Variable Related to responsibility is good, seen from the existence of BPD performance reports, related to transparency is not good because there are still many community aspirations that have not been channeled and realized due to the lack of socialization and active participation of the community. The influencing factors consist of supporting factors for performance, namely the existence of support for facilities and infrastructure in supporting BPD performance, and inhibiting factors, namely the lack of active community participation in village deliberations.

Keywords: Performance, BPD, Village

PENDAHULUAN

Organisasi pemerintah selalu berkaitan dengan penyelenggaraan yang dipengaruhi oleh kepemimpinan, untuk itu dalam pelaksanaan tugas harus didukung dengan berbagai hal yang memadai seperti kapasitas organisasi untuk itu juga diperlukan seorang pemimpin yang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, karena hanya seorang pemimpinlah yang mampu menggerakkan anak buahnya untuk mencapai apa yang telah direncanakan dan diharapkan oleh organisasi (Wiyono, Mahdi and Briantisno, 2022).

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sejauh mana tujuan organisasi yang telah direncanakan dapat dicapai baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Untuk mencapai tujuan tersebut keterlibatan berbagai unsur dalam organisasi sangat penting, diantaranya unsur sumber daya manusia. Organisasi dituntut untuk dapat mengelola sumber daya manusia. Walaupun didukung oleh sarana dan prasarana yang baik namun tidak didukung oleh sumber daya manusia maka kegiatan dalam sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan dalam sebuah organisasi. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bekerja lebih baik dan lebih cepat sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang tinggi.

Dalam organisasi terdapat hubungan antara kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja organisasi (*organization performance*). Suatu organisasi pemerintah maupun swasta besar maupun kecil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh orang atau sekelompok orang yang aktif berperan sebagai pelaku, dengan kata lain tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang dilakukan oleh orang dalam organisasi tersebut. Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh unsur pegawainya karena itu dalam mengukur suatu organisasi sebaiknya diukur dalam tampilan kerja dan pegawainya guna tercapainya tujuan organisasi

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat terkait pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Kinerja pegawai mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan organisasi. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja pegawai maka tujuan organisasi semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya yang terjadi apabila kinerja pegawai rendah atau tidak baik maka kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan organisasi sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya penilaian kinerja seorang pegawai maka organisasi dapat mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kinerja seseorang, sehingga bisa dilakukan tindakan atau umpan balik terhadap kinerja tersebut, apa yang harus diperbaiki, apa pula yang harus ditingkatkan dan diperbaharui demi kemajuan organisasi tersebut selain itu pengukuran ini menjadi evaluasi kedepannya bagi organisasi maupun bagi pegawai yang terlibat didalamnya, bahkan bisa jadi menjadi tolak ukur atau nilai indeks dalam kenaikan kinerja pegawai. Adanya pengukuran kinerja pegawai, organisasi dapat mengetahui sejauh mana tingkat kinerja pegawai sehingga organisasi dapat memberikan umpan balik terhadap hasil pengukuran kinerja, mendorong perbaikan kinerja, dan pengambilan keputusan sehingga organisasi memiliki sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Keberhasilan pencapaian tujuan dalam suatu organisasi tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki kualitas yang baik akan diperoleh jika organisasi secara sungguh-sungguh memperhatikan serta mengetahui kebutuhan organisasi dan kemampuan karyawannya. Untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi harus memiliki individu-individu dengan kualitas yang sesuai, jelas tugas, wewenang, tanggung jawab hubungan dan tata kerjanya. Sama halnya dengan BPD yang memiliki peran penting di masyarakat maka perlu sekali untuk dinilai kinerjanya, sejauh mana telah memberikan kontribusi bagi masyarakat, dan sejauh mana tugas dan tanggung jawab yang telah diterimanya dilaksanakan.

Sesuai dengan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengusulan calon kepala Desa berdasarkan kriteria atau penilaian masyarakat desa tersebut. Hal ini berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan kemampuan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam memajukan pembangunan pemerintahan desa. Pemerintahan Desa dalam merencanakan pembangunan desanya membutuhkan anggaran yang akan menopang kebutuhan pendanaan untuk memperlancar kegiatan pembangunan desa. Kemudian dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa sangat besar untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Apabila peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat memenuhi tugasnya dalam organisasinya dan mampu mensinergikannya, maka semua program dalam pemerintahan desa dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Badan Permusyawaratan Desa sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan disalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus mampu mewakili masyarakat di masing-masing daerah yang memilihnya.

Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan pembangunan sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan tersebut bisa mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa dan badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD, Pemerintahan dalam perundang-undangan merupakan pengayom, pelayan dan termasuk sebagai penjaga masyarakat atau penduduknya, sehingga semua aktivitas yang berhubungan dengan kemasyarakatan perlu dilakukan secara maksimal, agar tujuan pemerintah terwujud dan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar dapat memuaskan diantara keduanya baik itu masyarakat yang membutuhkan maupun pemerintah (sebagai pelaksana) yang telah mampu dengan baik memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

BPD mempunyai tugas dan fungsi dalam kegiatan menampung aspirasi dan gagasan yang berasal dari pemerintah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, tugas BPD tersebut menunjukkan begitu banyak dalam rangka menggali dari potensi masyarakat dan desa, agar semua lapisan masyarakat turut serta membangun dan memajukan desa untuk mencapai keberhasilan desanya. Mengingat keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat desa akan membantu dan mewakili masyarakat dalam berpartisipasi memajukan desa demi mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Fungsi BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, disini BPD dan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta aparatnya) merupakan mitra, bekerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai ungkapan, ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Namun berdasarkan observasi sementara yang penulis lakukan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, ditemukan beberapa permasalahan kinerja pegawai diantaranya :

1. Kurang tersalurnya aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, seperti partisipasi masyarakat di Desa Paliat dalam pembangunan dan pemerintahan Desa dimulai dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi, proses ini semata-mata didominasi oleh elit-elit desa yang ada di Desa Paliat seperti, pamong desa, BPD, pengurus RT, maupun pemuka masyarakat, tetapi tidak melibatkan unsur-unsur yang lain seperti perempuan, pemuda, kaum tani dan buruh.
2. Kurangnya pengetahuan dan bimbingan teknis yang diberikan kepada ketua dan BPD Di Desa Paliat sehingga kinerjanya tidak optimal, selama satu tahun hanya ada 2-3 kali bimbingan teknis yang diberikan pemerintah kepada BPD desa Paliat hal ini menyebabkan masih banyak BPD Desa Paliat yang kurang memahami tugas dan fungsinya seperti kurangnya pengetahuan membuat peraturan desa yang benar dan baik bersama kepala desa hingga kurangnya pengetahuan dalam menggunakan teknologi komputer untuk membuat laporan.
3. Kurangnya koordinasi maupun komunikasi antara kepala desa dengan ketua dan anggota BPD.

Berdasarkan sejumlah fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait hal tersebut dengan judul **"Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong"**.

METODE

Dalam peneliti ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *snowball sampling* yang informan sebanyak 12 orang. Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan analisis melalui cara reduksi data, serta penyajian data, dan verifikasi untuk penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni rangkaian data yang telah disusun secara sistematis menurut klasifikasinya dengan

member arti terhadap data tersebut menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan dan disusun dalam uraian kalimat-kalimat sehingga menjadi benar-benar merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian disusun suatu kesimpulan atas dasar jawaban dari hasil penelitian tersebut dan selanjutnya disusun saran-saran dari peneliti untuk perbaikan atas permasalahan yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Agus Dwiyanto dalam Lilik Nur Hayati (2012 : 17) mengemukakan bahwa untuk menilai kinerja organisasi dapat digunakan beberapa kriteria sebagai pedoman penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain :

1. Efisiensi Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan.
2. Efektivitas Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepastian. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan pada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.
4. Daya Tanggap Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

1) Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, berhasil, dan tanpa pemborosan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan terbaik antara hasil yang dicapai dengan usaha yang dilakukan (Aplonia Lau, 2023). Efisiensi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti: Efisiensi kerja Perbandingan terbaik antara hasil kerja dengan usaha yang dilakukan. Efisiensi operasional Upaya untuk mengukur seberapa baik profit yang didapat sebagai fungsi dari biaya operasional. Efisiensi ekonomi Upaya untuk mengoptimalkan sumber daya untuk melayani setiap orang dengan sebaik mungkin. Efisiensi waktu Kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengurangi kualitas hasil. Efisiensi sumber daya Menggunakan sumber daya Bumi yang terbatas secara berkelanjutan sambil meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan usaha yang dilakukan. Efisiensi juga dapat diukur dengan membandingkan hasil bersih yang nyata dengan pengorbanan yang diberikan.

a) Ketersedian SDM

SDM adalah singkatan dari Sumber Daya Manusia, yaitu orang-orang yang bekerja di suatu organisasi. SDM merupakan faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi. Karakteristik SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik. SDM mencakup seluruh karyawan dari berbagai jenjang organisasi, mulai dari staf hingga manajemen puncak. SDM berperan sebagai pelaksana tugas, sumber inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan perusahaan. SDM harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Terkait ketersediaan SDM baik karena anggota BPD yang ada di desa Paliat sudah cukup dan lengkap yakni 5 orang. Istiqamah sebagai ketua, M Hamini sebagai wakil ketua, Rahman hakim sebagai sekretaris dan M. Alfi Syarif dan Norma Heriyani sebagai anggota.

b) Sarana Prasarana

Sarana prasarana adalah alat, fasilitas, atau infrastruktur yang menunjang kegiatan atau aktivitas tertentu (Sinta and Syelviani, 2021). Sarana dan prasarana saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Contoh sarana prasarana Sarana: kertas, pulpen, buku, komputer, laptop, smartphone Prasarana: gedung, ruangan, jalan raya, jembatan. Sarana prasarana baik, sarana prasarana dalam menunjang kinerja BPD meliputi sarana administrative seperti laptop, wifi, printer dan lain-lain untuk memudahkan dalam membuat laporan hingga kendaraan operasional yakni satu buah sepeda motor untuk memudahkan anggota BPD dalam menjalankan tugasnya dan membuat laporan.

2) Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan input dan output yang dihasilkan. Kata efektifitas berasal dari kata bahasa Inggris "effective" yang berarti berhasil dengan baik. Efektivitas dapat dikaitkan dengan berbagai bidang, seperti: Komunikasi, Pekerjaan, Prestasi, Kebijakan, Manajemen kerja. Efektivitas sering digunakan saat evaluasi atau perencanaan kegiatan. Beberapa contoh penerapan efektivitas: Efektivitas pelayanan kepastakaan, Efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Efektivitas pekerjaan, Efektivitas komunikasi, Efektivitas prestasi.

a) Tugas BPD

Tugas adalah pekerjaan yang harus dikerjakan, atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Tugas dapat menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi. Definisi tugas Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Tugas adalah pekerjaan yang dibebankan oleh seseorang yang berwenang, pemberi kerja, atau oleh keadaan. Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Terkait tugas BPD dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Permendagri yakni manampun dan menyalurkan aspirai masyarakat serta juga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa Paliat terutama mengawasi kinerja Kepala Desa, dalam hal ini BPD dan Kepala Desa juga harus bersama-sama untuk membangun dan mengembangkan kemajuan desa dengan harapan bahwa hal tersebut dapat memajukan desa.

b) Fungsi BPD

Fungsi pegawai dapat berupa melaksanakan tugas, memberikan pelayanan, dan menjaga kesejahteraan. Melaksanakan tugas Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Memberikan pelayanan Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, Menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, Menjadi pelayan publik. Fungsi BPD baik, (BPD) di Desa Paliat menjalankan fungsinya sesuai dengan ruang lingkupnya sesuai dengan wilayahnya dan ditetapkan berdasarkan pemilihan langsung.

3) Keadilan

a) Penyaluran aspirasi masyarakat

Bentuk pengaduan aspirasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pun beragam, terdapat beberapa bentuk pengaduan aspirasi, yaitu dengan aspirasi secara tertulis, aspirasi secara lisan, aspirasi melalui unjuk rasa atau demonstrasi, aspirasi melalui kunjungan kerja DPRD, dan yang terakhir aspirasi secara daring atau online. Terkait penyaluran aspirasi belum baik karena kurangnya sosialisasi dan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam musyawarah melalui Badan Permusyawaratan Desa sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, banyak masyarakat yang menganggap bahwa ini adalah tugas pemerintahan desa saja, selain itu karena sibuknya masyarakat juga menyebabkan ketidakhadiran atau partisipasi aktif dari masyarakat hal tersebut berdampak pada adanya beberapa aspirasi masyarakat yang tidak dapat tersalurkan melalui BPD.

b) Adil

Keadilan merupakan pilar dasar bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera serta bermartabat. Sebuah cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua. Makna keadilan itu sendiri adalah tidak berat sebelah, menimbang sama berat, dan mengukur sama panjang. Terkait adil belum baik karena tidak semua aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada BPD karena masih ada masyarakat yang merasa bahwa pembangunan belum merata dan beberapa usulan belum terealisasi karena kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat.

4) Daya Tanggap

a) Tanggung Jawab

BPD mempunyai tugas: a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan musyawarah Desa; g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h. menyelenggarakan musyawarah Desa. Terkait tanggung jawab baik, dilihat adanya laporan kinerja BPD, yang mana dalam laporan ini memuat kinerja BPD selama satu tahun dilaporkan tersebut tertera kinerja BPD bagus maka berarti selama ini BPD telah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Laporan tersebut ada secara tertulis ada pula secara lisan yang dapat dipertanggung jawabkan.

b) Transparan

Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi. Hal ini dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting.

Hal ini terutama dalam bidang politik atau pemerintahan. Terkait transparansi belum baik karena kurangnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat terutama dalam pembangunan didesa masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan dan terealisasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

a. Faktor Pendukung

1. Adanya dukungan sarana prasarana dalam menunjang kinerja BPD

Adanya dukungan sarana prasarana dalam menunjang kinerja BPD, sarana prasarana dalam menunjang kinerja BPD meliputi sarana administrative seperti laptop, wifi, printer dan lain-lain untuk memudahkan dalam membuat laporan hingga kendaraan operasional yakni satu buah sepeda motor untuk memudahkan anggota BPD dalam menjalankan tugasnya dan membuat laporan.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah

Partisipasi masyarakat penting karena dapat membantu dalam: Membuat kebijakan publik yang efektif Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam memahami nilai-nilai, ide-ide, dan rekomendasi masyarakat. Memperkuat demokrasi Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam memahami kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama antara keduanya. Mendorong kewirausahaan lokal Partisipasi masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah desa dalam memahami kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama antara keduanya. Membantu dalam pergantian kekuasaan secara damai Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat membantu dalam pergantian kekuasaan secara damai dan teratur. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: Partisipasi politik, Partisipasi sosial, Partisipasi warga, Berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, Berpartisipasi dalam pengawasan program pembangunan.. Namun yang terjadi pada desa Paliat Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa, kurangnya sosialisasi dari BPD untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai hal seperti rendahnya partisipasi masyarakat itu sendiri karena kurangnya sosialisasi dan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam musyawarah. dilihat dari kurang tersalurnya aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara akuntabel dan transparan.

SIMPULAN

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong baik hal ini dilihat dari : Variabel Efisiensi Ketersediaan SDM baik, BPD yang ada di desa Paliat terdiri dari 5 orang. Terkait sarana prasarana baik dilihat dari ketersediaan peralatan seperti laptop, wifi, printer, tempat kerja hingga kendaraan operasional yakni satu buah sepeda motor untuk memudahkan anggota BPD dalam menjalankan tugasnya dan membuat laporan. Variabel Efektivitas tugas BPD dilaksanakan dengan baik dilaksanakan sesuai dengan dengan Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala Desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya keberadaan BDP dalam ranah politik dan sosial desa, terkait fungsi BPD baik, (BPD) di Desa Paliat menjalankan fungsinya sesuai dengan ruang lingkupnya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Variabel Keadilan terkait penyaluran aspirasi belum baik dilihat dari kurang tersalurkanya aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa sehingga pemerintahan desa tidak dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, seperti partisipasi masyarakat di Desa Paliat dalam pembangunan dan pemerintahan Desa dimulai dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi, proses ini semata-mata di dominasi oleh elit-elit desa yang ada di Desa, terkait adil belum baik karena masih ada masyarakat yang merasa bahwa pembangunan belum merata dan beberapa usulan belum terealisasi karena kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Variabel Daya TanggapTerkait tanggung jawab baik, dilihat adanya laporan kinerja BPD, terkait transparansi belum baik karena karena masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan dan terealisasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat. Faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung kinerja adalah adanya dukungan sarana prasarana dalam menunjang kinerja BPD, dan faktor penghambat kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam musyawara desa.

Berdasarkan hal tersebut maka disarankan: Kepada Ketua BPD untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam pelaksanaan program dengan cara mendatangi masyarakat dan melakukan sosialisasi secara langsung untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap penyaluran aspirasi. Kepada masyarakat untuk selalu memberikan masukan dan terlibat aktif dalam pelaksanaan program yang di laksanakan dengan cara memberikan evaluasi baik dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk perbaikan program selanjutnya.

BPD atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bisa dibilang sebagai Badan Parlemen Desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam struktur organisasi pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu

kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas dan wewenang yang harus dijalankan sebagai wujud dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dijelaskan sejumlah tugas dan wewenang BPD yaitu sebagai berikut ini. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa; Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten; Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa; Membuat susunan tata tertib BPD; Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pentingnya tugas, fungsi dan wewenang BPD di desa sekarang ini. Sehingga tidak berlebihan jika warga desa sangat berharap BPD agar mampu membuat aspirasi warga tersalurkan dengan baik. Untuk memahami berbagai esensi yang ada dalam peraturan ini bakal lebih gamblang jika Anda mempelajari pasal demi pasal yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ainah, N. et al. (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administrais*, 6(2), pp. 152–159.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Aplonia Lau, E. (2023) 'Efektivitas Dan Efisiensi Melalui Pemanfaatan Runout Time (ROT) Method', *Jurnal Exchal*, 5(1), pp. 1–11.
- Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al 'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.
- Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.
- Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 8(3), pp. 124–132.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN



BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.

Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia',



Journal of Public Policy and Administration, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20210503.16>.

Sinta, D. and Syelviani, M. (2021) 'Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Tim Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan', *Jurnal Analisis Manajemen*, 7(1), pp. 16–28. Available at: <https://doi.org/10.32520/jam.v7i1.1652>.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.

Wiyono, S.T., Mahdi, S. and Briantisno, P. (2022) 'Kajian Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dalam Membangun Persepsi Masyarakat Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur', *Policy and Maritime Review*, 1(1), pp. 35–48. Available at: <https://doi.org/10.30649/pmr.v1i2.32>.